

**“DAMPAK DAN MAKNA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NELAYAN:
KAJIAN TEORETIS KRITIS DI PESISIR BARAT KABUPATEN
BULELENG”**

Oleh : I Nyoman Sukraaliawan¹⁾ dan I Gusti Ayu Maheri Agung²

Abstrak

Pemberdayaan masyarakat nelayan merupakan strategi pembangunan partisipatif yang sering dipromosikan sebagai solusi atas kemiskinan struktural dan ketimpangan sosial di wilayah pesisir. Namun demikian, implementasi pemberdayaan kerap menghadapi paradoks antara tujuan ideal dan realitas praksis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak dan makna dari pemberdayaan masyarakat nelayan di wilayah pesisir barat Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif interpretatif dengan metode *verstehen*, melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan telah memberikan dampak positif berupa penguatan kelembagaan lokal, peningkatan posisi tawar nelayan, adaptasi ekonomi terhadap musim paceklik, serta tumbuhnya kesadaran ekologis. Namun di sisi lain, pemberdayaan juga menimbulkan dampak negatif seperti eksploitasi sumber daya berlebih, konflik sosial internal, dan berkembangnya budaya ketergantungan terhadap bantuan. Lebih jauh, pemberdayaan dimaknai oleh masyarakat nelayan tidak hanya sebagai proses ekonomi, melainkan sebagai jalan menuju harga diri, pengakuan sosial, pembelajaran kolektif, dan transformasi habitus.

Analisis teoritik dengan menggunakan kerangka Merton (fungsi manifes-laten), Gramsci (hegemoni dan kontra-hegemoni), Bourdieu (habitus dan modal sosial), serta paradigma post-development (Korten dan Escobar) menunjukkan bahwa pemberdayaan sejati adalah proses sosial-politik yang membuka ruang transformasi struktural dan kultural. Dengan demikian, keberhasilan pemberdayaan nelayan tidak dapat diukur secara linier, melainkan harus dilihat sebagai proses yang mengandung dinamika kekuasaan, resistensi, dan pemaknaan ulang terhadap diri dan dunia. Studi

ini merekomendasikan pentingnya desain pemberdayaan yang kontekstual, reflektif, partisipatif, dan berorientasi pada pembebasan serta keberlanjutan sosial-ekologis.

Kata Kunci: pemberdayaan, nelayan, hegemoni, habitus, kesadaran kritis, post-development, pesisir Buleleng.

1. PENDAHULUAN

Pemberdayaan masyarakat merupakan pendekatan yang tumbuh dari kritik terhadap paradigma pembangunan yang bersifat *top-down*, teknokratis, dan berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata (*growth-oriented development*). Dalam dekade terakhir, pendekatan ini berkembang menjadi arus utama dalam berbagai inisiatif pembangunan berbasis komunitas, khususnya di negara-negara berkembang. Robert Chambers (1997) menekankan bahwa pembangunan yang berpusat pada rakyat menuntut adanya relasi yang setara antara negara dan masyarakat, dan menolak logika pembangunan yang memarginalkan mereka yang miskin dan lemah. Dalam kerangka ini, pemberdayaan tidak hanya berarti penguatan kapasitas teknis, melainkan juga proses transformasi relasi kuasa dan perubahan struktur sosial yang timpang.

Salah satu kelompok masyarakat yang paling relevan dengan pendekatan ini adalah masyarakat nelayan, terutama yang berada di kawasan pesisir. Di Indonesia, kawasan pesisir merupakan wilayah yang memiliki potensi ekonomi tinggi namun juga menyimpan kerentanan sosial dan ekologis yang kompleks. Sekitar 25 juta penduduk tinggal di wilayah pesisir dan sebagian besar menggantungkan hidup dari kegiatan perikanan. Namun ironisnya, masyarakat nelayan adalah salah satu kelompok yang paling rentan terhadap kemiskinan, eksploitasi, dan ketidakberdayaan struktural. Kusnadi (2003; 2007) mencatat bahwa ketimpangan akses terhadap sumber daya laut, ketergantungan terhadap tengkulak, serta lemahnya kelembagaan nelayan menjadi faktor utama yang melanggengkan kemiskinan nelayan.

Kondisi tersebut juga tercermin di Provinsi Bali, khususnya di wilayah pesisir barat Kabupaten Buleleng. Kawasan ini mencakup beberapa desa pesisir seperti

Sumberkima, Penyabangan, dan Pemuteran yang secara geografis berada di zona pesisir yang kaya akan sumber daya laut dan keanekaragaman hayati. Namun, di balik kekayaan ekologis tersebut, terdapat realitas sosial-ekonomi yang mengkhawatirkan. Mayoritas nelayan di kawasan ini adalah nelayan kecil yang mengandalkan alat tangkap tradisional dengan jangkauan terbatas. Mereka sering kali berada dalam posisi subordinat terhadap pedagang perantara atau tengkulak, yang menguasai rantai distribusi hasil laut dan menentukan harga pasar. Ketika hasil tangkapan menurun akibat musim atau kerusakan ekosistem, nelayan tidak memiliki alternatif penghidupan yang memadai. Banyak dari mereka akhirnya beralih ke pekerjaan informal atau menggantungkan hidup dari bantuan sosial pemerintah dan program-program LSM.

Berbagai program pemberdayaan telah diluncurkan di wilayah ini, baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun organisasi non-pemerintah. Program-program seperti PEMP (Program Ekonomi Masyarakat Pesisir), PNPM Mandiri Kelautan dan Perikanan, hingga pelatihan dan penyuluhan konservasi dari LSM seperti MAC dan Yayasan Pilang menjadi bagian dari upaya mengangkat derajat nelayan. Namun implementasi program tersebut tidak selalu berjalan secara efektif. Beberapa program justru menciptakan ketergantungan baru terhadap bantuan, alih-alih mendorong kemandirian. Di sisi lain, modernisasi alat tangkap yang dilakukan tanpa kajian ekologis telah mendorong praktik overfishing dan membahayakan keberlanjutan sumber daya laut. Hal ini menunjukkan adanya paradoks dalam praktik pemberdayaan: niat untuk membebaskan justru kadang menghasilkan bentuk baru dari keterikatan struktural dan kerusakan ekologis.

Sebagian besar kajian mengenai pemberdayaan masyarakat pesisir cenderung berfokus pada evaluasi program dan dampak ekonomi jangka pendek. Kajian dari Korten (1980), misalnya, menggarisbawahi pentingnya pendekatan pembelajaran sosial dan kelembagaan lokal, sedangkan Chambers (1997) lebih menekankan partisipasi masyarakat sebagai esensi dari pembangunan. Meskipun penting, pendekatan seperti ini sering kali tidak menggali secara mendalam dinamika kultural, ideologis, dan relasi kuasa yang melingkupi proses pemberdayaan. Dengan kata lain,

terdapat kekosongan dalam kajian yang melihat pemberdayaan sebagai proses yang juga mengandung makna sosial, simbolik, dan bahkan ideologis dalam kehidupan sehari-hari masyarakat nelayan. Dengan demikian pada penelitian ini dapat dikemukakan rumusan masalah yaitu : “bagaimanakah dampak dan makna dari proses pemberdayaan nelayan di wilayah pesisir barat Kabupaten Buleleng ?”.

2. LANDASAN TEORI

Penelitian ini berpijak pada pendekatan multidisipliner dalam menganalisis pemberdayaan masyarakat nelayan. Pendekatan yang digunakan bersifat interpretatif-kualitatif dengan metode *verstehen*, yang memungkinkan pengungkapan makna subjektif yang dibangun oleh masyarakat nelayan terhadap program-program pemberdayaan yang mereka alami. Dengan mendialogkan temuan lapangan dengan teori-teori sosial seperti fungsionalisme (Merton,2002), hegemoni (Gramsci,2003), praktik sosial (Bourdieu,2010), dan paradigma post-development (Korten,1996);Escobar,(2012)), penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis sekaligus praktis untuk memahami pemberdayaan secara lebih reflektif, kontekstual, dan membebaskan. Pemilihan teori dilakukan secara selektif untuk mengungkap kompleksitas dimensi struktural, kultural, simbolik, dan ideologis yang terkandung dalam praktik pemberdayaan. Lima perspektif teoretis berikut ini dipilih karena mampu menjelaskan secara holistik dinamika sosial dalam masyarakat nelayan pesisir. Di dalam Fungsionalisme Struktural, terdapat Fungsi Manifes dan Laten (Robert K. Merton, 1986). Fungsi manifes — hasil yang disengaja dan dirancang dari sebuah tindakan — dan fungsi laten, yaitu hasil tak terduga namun tetap berdampak secara sosial. Pemberdayaan dalam kerangka ini tidak dapat semata-mata dinilai dari output formal seperti peningkatan penghasilan atau pelatihan keterampilan. Dalam banyak kasus, fungsi laten dari pemberdayaan justru lebih menentukan keberlanjutan sosial, seperti tumbuhnya solidaritas, rasa percaya diri, atau munculnya elit lokal baru yang memperkuat kohesi sosial.

Namun demikian, fungsionalisme juga memberi ruang untuk memahami **disfungsi**: ketika program pemberdayaan justru menghasilkan konsekuensi negatif, seperti terciptanya ketergantungan pada bantuan, konflik internal kelompok, atau kerusakan ekologis akibat intensifikasi alat tangkap. Dalam konteks nelayan Buleleng, fungsi manifes dari program seperti PNPM Kelautan atau PEMP adalah peningkatan sarana produksi. Namun fungsi laten yang muncul antara lain: budaya menunggu bantuan, keretakan sosial akibat kecemburuan dalam pembagian bantuan, serta overproduksi yang merusak stok ikan. Teori Merton memungkinkan kita untuk membaca lapisan-lapisan sosial yang sering kali tak terungkap dalam evaluasi formal.

Gramsci (1971) menjelaskan hegemoni sebagai dominasi kelas yang tidak semata-mata melalui paksaan, melainkan melalui pengaruh ideologis yang diterima secara sukarela oleh kelompok subordinat. Dalam praktik pemberdayaan masyarakat, hegemoni bekerja secara halus melalui wacana dominan seperti “pembangunan berbasis masyarakat” atau “modernisasi perikanan” yang kerap menutupi relasi kuasa dan kepentingan ekonomi-politik di baliknya.

Dalam konteks nelayan pesisir, relasi antara nelayan dan tengkulak, atau antara nelayan dan negara (melalui program-programnya), mencerminkan bentuk relasi hegemonik. Ketika program pemberdayaan hanya mentransmisikan nilai-nilai dominan tanpa ruang partisipasi kritis, maka proses pemberdayaan berubah menjadi alat reproduksi struktur lama. Sebaliknya, **kontra-hegemoni** muncul ketika nelayan membentuk organisasi sendiri, menyuarakan kepentingannya melalui forum partisipatif, atau melakukan resistensi terhadap kebijakan yang merugikan.

Bourdieu (1990) memperkenalkan konsep **habitus** sebagai struktur mental dan sosial yang terbentuk dari pengalaman hidup yang berulang dan diwariskan secara kolektif. Habitus nelayan tradisional dibentuk oleh pengalaman panjang hidup dalam ketidakpastian alam, ketergantungan pada tengkulak, dan minimnya akses terhadap pengetahuan formal. Kebiasaan seperti “pasrah pada musim” atau “tidak mencampuri urusan pemerintah” adalah bentuk habitus yang melekat.

Pemberdayaan, dalam kerangka ini, merupakan **proses transformasi habitus** melalui akses pada berbagai bentuk **modal**, yaitu : **Modal social**, jaringan dan solidaritas komunitas nelayan, **Modal budaya**, pengetahuan baru, pelatihan, literasi laut, dan **modal simbolik**, pengakuan dari aktor lain (pemerintah, LSM, publik). Arena pemberdayaan adalah medan pertarungan di mana berbagai aktor bersaing untuk mengklaim otoritas atas “cara hidup yang benar”. Misalnya, ketika LSM memperkenalkan konservasi laut berbasis komunitas, terjadi benturan antara nilai ekologis (modal budaya baru) dengan nilai produktif jangka pendek nelayan (habitus lama). Perubahan tidak terjadi secara linier, tetapi melalui kontestasi dan negosiasi sosial yang kompleks. Teori Bourdieu sangat relevan untuk membaca dinamika tersebut.

Paradigma **post-development** muncul sebagai kritik tajam terhadap modernisasi yang dianggap bersifat euro-sentris, eksploitatif, dan tidak kontekstual (Escobar, 1995). Pembangunan dalam kerangka ini sering kali mengobjektifikasi masyarakat lokal, menjadikan mereka target statistik tanpa memahami nilai, relasi sosial, dan sistem pengetahuan mereka.

David Korten (1980; 1990) mengusulkan model **pembangunan berbasis pembelajaran sosial**, yang menekankan proses dialogis, kesetaraan relasi, dan refleksi kritis dalam setiap tahapan pembangunan. Dalam konteks nelayan pesisir, pendekatan ini menolak intervensi pembangunan yang datang “dari atas” dan menggantinya dengan desain program berbasis kekuatan lokal, seperti organisasi nelayan, hukum adat laut, atau pranata sosial berbasis desa adat. Dalam konteks Buleleng, masih banyak program yang terjebak dalam logika *delivery* bantuan dan proyek, tanpa mekanisme reflektif dari masyarakat. Perspektif post-development mengajak kita untuk membongkar wacana pembangunan sebagai sesuatu yang “netral” dan mengembalikannya pada praksis transformatif yang berpihak pada rakyat.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan **kualitatif interpretatif**, dengan metode **verstehen** sebagaimana dikembangkan oleh Max Weber. Pendekatan ini dipilih untuk mengungkap makna subjektif yang dikonstruksi oleh masyarakat nelayan terhadap praktik pemberdayaan yang mereka alami, serta memahami konteks sosial-kultural di balik perilaku, narasi, dan tindakan mereka. Tipe penelitian ini bersifat **eksploratif-kritis**, bertujuan tidak hanya untuk mendeskripsikan fenomena pemberdayaan, tetapi juga untuk menganalisis struktur kuasa, simbolik, dan ideologis yang menyertainya. Penelitian ini tidak berangkat dari asumsi netralitas pembangunan, melainkan mencoba memposisikan pengalaman pemberdayaan sebagai praktik sosial yang sarat makna dan pertarungan wacana.

Lokasi penelitian dipusatkan di **wilayah pesisir barat Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali**, khususnya pada tiga desa pesisir yaitu : Desa Sumberkima, Desa Penyabangan dan Desa Pemuteran.

Ketiga desa ini dipilih berdasarkan karakteristiknya sebagai wilayah dengan potensi perikanan tinggi namun juga menghadapi tantangan ekologis, ekonomi, dan sosial yang kompleks. Selain itu, wilayah ini juga telah menjadi lokasi berbagai intervensi pemberdayaan oleh pemerintah maupun LSM dalam satu dekade terakhir, sehingga relevan sebagai studi kasus. Penentuan informan dilakukan dengan teknik *purposive sampling*, dengan kriteria:

- Nelayan aktif yang terlibat dalam program pemberdayaan
- Pengurus kelompok usaha bersama (KUB)
- Tokoh masyarakat desa pesisir
- Pendamping lapangan (PPL)
- Perwakilan dari LSM yang aktif di bidang konservasi laut
- Aparatur desa atau kecamatan yang terkait dengan pengelolaan pesisir

Jumlah informan yang diwawancarai sebanyak **10 orang**, yang mewakili berbagai kepentingan dan posisi sosial dalam komunitas nelayan. Teknik ini memungkinkan eksplorasi perspektif yang kaya dan beragam. Data dikumpulkan melalui tiga teknik utama: 1) wawancara mendalam (*in-depth interview*), yaitu dengan menggunakan

pertanyaan terbuka dan bersifat semi-terstruktur. Wawancara diarahkan untuk menggali pengalaman, persepsi, makna, dan evaluasi kritis para informan terhadap proses pemberdayaan yang mereka alami. 2) Observasi, dengan melakukan pengamatan secara langsung di lokasi penelitian. Dimana peneliti hadir dalam kegiatan kelompok nelayan, pelatihan, rapat desa, dan aktivitas harian nelayan untuk memahami dinamika sosial secara langsung. Observasi ini juga digunakan untuk mencatat interaksi sosial, pola komunikasi, serta simbol-simbol budaya lokal. 3) Studi dokumentasi,

yaitu penggunaan dokumen program pemberdayaan, laporan LSM, dinas terkait dan arsip kelompok nelayan digunakan untuk melengkapi dan mengonfirmasi data lapangan.

Semua data yang diperoleh dianalisis secara **tematik-kontekstual**, dengan model **analisis interaktif** dari Miles dan Huberman (1994), yang meliputi:

1. **Reduksi data** – menyeleksi, merangkum, dan memfokuskan data lapangan.
2. **Penyajian data** – menyusun dalam bentuk narasi, kutipan, dan tabel tematik.
3. **Penarikan kesimpulan dan verifikasi** – melalui proses interpretasi mendalam dan pembacaan ulang berulang kali. Proses interpretasi menggunakan pendekatan *verstehen*, yang memungkinkan peneliti memasuki dunia makna subyektif para informan. Temuan-temuan lapangan kemudian dikaitkan dengan kerangka teoretis (Merton, Gramsci, Bourdieu, Korten, Escobar) untuk menghasilkan pemahaman reflektif dan kritis.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Dampak Pemberdayaan Masyarakat Nelayan

4.1.1 Dampak Positif

1. Penguatan Posisi Tawar Melalui Kelembagaan Lokal

Salah satu temuan menonjol dari penelitian ini adalah tumbuhnya kelembagaan nelayan melalui Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang berperan sebagai wadah solidaritas ekonomi dan sosial. Beberapa informan mengungkapkan bahwa sebelum

adanya KUB, mereka bernegosiasi harga secara individual dan sangat tergantung pada tengkulak. *“Dulu kita hanya bisa ikut saja harga dari pengepul, nggak berani nawar. Tapi sekarang lewat kelompok, kita bisa tahu harga di tempat lain, dan bisa ngatur sendiri.”*

(Wawancara dengan I Wayan S., Ketua KUB Sumber Laut, Desa Penyabangan)

Kutipan wawancara ini menunjukkan adanya peningkatan **modal sosial** (Bourdieu) dan kapasitas negosiasi kolektif, yang menjadi salah satu **fungsi manifes** dari program pemberdayaan (Merton). Posisi tawar yang meningkat merupakan hasil dari terbentuknya jaringan horizontal antar-nelayan yang memperkuat *bargaining power* terhadap struktur vertikal yang selama ini mendominasi (tengkulak, pedagang besar). Lebih jauh, keberadaan KUB juga memfasilitasi akses terhadap program bantuan pemerintah, pelatihan, serta lembaga keuangan mikro. KUB menjadi arena baru tempat nelayan membangun *self-reliance* dan kesadaran kolektif.

2. Adaptasi Sosial-Ekonomi di Tengah Krisis Musiman

Ketika hasil tangkapan menurun akibat musim barat atau cuaca ekstrem, nelayan pesisir Buleleng mengembangkan strategi adaptif dengan mencari pekerjaan alternatif. Beberapa menjadi tukang ojek, buruh bangunan, atau mengandalkan istri mereka untuk menjalankan usaha kecil. *“Kalau musim barat datang, ya kita nggak bisa melaut. Saya jadi kuli bangunan. Istri buka warung kecil. Jadi, kami bagi peran supaya tetap bisa makan.”*

(Wawancara dengan Komang D., nelayan Desa Sumberkima). Strategi ini menunjukkan kemampuan bertahan dan fleksibilitas sosial yang tinggi, yang dalam perspektif **teori adaptasi ekologis** dan **resiliensi komunitas** merupakan bentuk kemampuan komunitas untuk menyesuaikan diri dengan tekanan lingkungan (Adger, 2000). Ini juga sejalan dengan **fungsi laten** dalam teori Merton, di mana pemberdayaan tidak hanya meningkatkan kapasitas ekonomi langsung, tetapi juga membentuk *survival strategies* yang beragam dan kontekstual.

3. Tumbuhnya Kesadaran Ekologis dan Perubahan Praktik

Salah satu dampak penting adalah pergeseran perilaku nelayan dari eksploitasi destruktif menuju konservasi. Dalam beberapa kelompok, praktik pengeboman ikan atau penggunaan potasium berkurang drastis setelah adanya edukasi dan pendampingan dari LSM lingkungan. *“Dulu saya pakai potas, terus dikasih tahu sama orang LSM itu, pelatihan, terus diajak lihat karang yang mati. Saya sadar. Sekarang saya pakai bubu dan pancing biasa.”* (Wawancara dengan Nyoman L., nelayan Desa Pemuteran)

Transformasi ini menunjukkan keberhasilan **pembelajaran sosial** (Buck et al., 2001), di mana proses penyadaran tidak hanya mentransfer pengetahuan teknis, tetapi juga mengubah persepsi dan nilai terhadap laut sebagai sumber kehidupan. Proses ini dapat dibaca sebagai bentuk *transcultural learning*, di mana nilai-nilai konservasi ekologis diserap secara reflektif oleh masyarakat lokal.

4.1.2 Dampak Negatif

1. Overproduksi dan Tekanan terhadap Ekologi Laut

Modernisasi alat tangkap seperti mesin tempel dan jaring sorong telah meningkatkan kapasitas produksi, namun juga mempercepat eksploitasi sumber daya laut. Beberapa nelayan mengakui bahwa dengan alat baru, mereka bisa menangkap ikan lebih banyak dalam waktu singkat.

“Dulu satu malam paling lima kilo. Sekarang bisa sampai dua puluh. Tapi kalau terus begini, nanti ikannya habis juga.” (Wawancara dengan Kadek R., nelayan Desa Penyabangan)

Paradoks ini menunjukkan disfungsi laten dari pemberdayaan yang terlalu berorientasi pada produktivitas tanpa mempertimbangkan daya dukung lingkungan. Dalam perspektif **post-development** (Escobar, 1995), hal ini mencerminkan bagaimana

proyek pembangunan sering kali melanjutkan logika kapitalistik yang justru merusak keberlanjutan jangka panjang.

2. Budaya Ketergantungan terhadap Bantuan

Beberapa informan mengekspresikan bahwa mereka “menunggu program berikutnya” atau “menunggu bantuan dari pemerintah”, tanpa inisiatif untuk mengembangkan usaha secara mandiri. “Kami sudah biasa dapat bantuan dari program. Kalau belum ada program, ya kita tunggu saja.” (*Wawancara dengan I Made P., anggota KUB di Desa Sumberkima*). Pola pikir ini merupakan bentuk **hegemoni pasif** (Gramsci), di mana masyarakat menerima logika dominasi dengan bentuk-bentuk baru: bukan lagi penindasan langsung, melainkan ketergantungan sistemik yang dilembagakan melalui program. Ini bertolak belakang dengan tujuan ideal pemberdayaan, yakni kemandirian dan kontrol atas kehidupan sendiri.

3. Konflik Sosial Intra-Komunitas

Pemberian bantuan yang tidak merata, tidak transparan, atau dipolitisasi menimbulkan kecemburuan dan perpecahan di kalangan anggota kelompok.

“Waktu ada bantuan jaring, yang dapat cuma kelompoknya pak kepala dusun. Kita nggak dikasih, padahal sama-sama nelayan.” (Wawancara dengan Gusti A., nelayan Desa Pemuteran) Kondisi ini menunjukkan lemahnya kelembagaan lokal dan absennya prinsip partisipasi deliberatif dalam proses pemberdayaan. Dalam perspektif **Korten (1980)**, kegagalan ini bisa disebabkan oleh tidak adanya ruang belajar sosial dan refleksi kolektif dalam manajemen program.

4.2. Makna Pemberdayaan bagi Masyarakat Nelayan

Dalam konteks hidup Masyarakat nelayan, pemberdayaan mengandung dimensi simbolik dan ideologis yang membentuk identitas, harga diri, dan relasi kuasa dalam komunitas dengan suatu makna yang tersirat di dalamnya. Adapun beberapa makna dari pemberdayaan Masyarakat nelayan yaitu :

a. Pemberdayaan sebagai Jalan Menuju Harga Diri dan Pengakuan Sosial

Salah satu makna terdalam dari proses pemberdayaan bagi masyarakat nelayan bukan terletak pada peningkatan pendapatan semata, melainkan pada bagaimana program-program tersebut membuka ruang bagi mereka untuk memperoleh **pengakuan sosial dan harga diri** sebagai individu dan sebagai bagian dari komunitas. Di tengah sejarah panjang marginalisasi, pemberdayaan menjadi medium simbolik dan praksis yang memungkinkan nelayan untuk menyuarakan pendapat, menegosiasikan posisi sosial, serta membangun kembali identitas diri yang sebelumnya ditekan oleh struktur sosial yang dominan. Bagi banyak nelayan, terlibat dalam kelompok, mengikuti pelatihan, atau hadir dalam forum musyawarah desa merupakan pengalaman baru yang melahirkan rasa percaya diri dan keberanian untuk “diakui” sebagai warga negara yang utuh dan setara. Pemberdayaan, dalam konteks ini, tidak hanya bersifat fungsional, tetapi juga eksistensial dan politis. Seorang informan mengatakan : *“Sekarang saya bisa bicara di rapat desa. Dulu saya diam saja, merasa bodoh. Tapi setelah ikut pelatihan dan kelompok, saya percaya diri.”* (Wawancara dengan Luh N., istri nelayan, Desa Pemuteran).

Pemberdayaan dalam hal ini menjadi **alat transformasi simbolik** (Bourdieu), di mana seseorang memperoleh *modal simbolik* berupa pengakuan, kepercayaan diri, dan keberanian untuk berpartisipasi dalam ruang publik. Proses ini tidak bisa diukur dengan indikator ekonomi, namun sangat penting dalam konteks demokratisasi lokal.

b. Pemberdayaan sebagai Proses Pembelajaran dan Solidaritas Baru

Lebih dari sekadar intervensi ekonomi, pemberdayaan bagi masyarakat nelayan di pesisir barat Buleleng dipahami sebagai suatu proses pembelajaran sosial yang berlangsung secara kolektif, partisipatif, dan berkelanjutan. Dalam ruang-ruang interaksi kelompok — seperti musyawarah nelayan, pelatihan keterampilan, atau diskusi informal — terjadi pertukaran gagasan, pengetahuan, dan pengalaman hidup yang memperluas wawasan serta memperkuat kesadaran kritis. Proses ini membentuk komunitas pembelajar yang saling mendukung, membangun empati, dan mempererat

kohesi sosial. Pemberdayaan dengan demikian menjadi jalan untuk menumbuhkan solidaritas baru, di mana nilai gotong royong dan tanggung jawab kolektif menemukan ruang aktualisasinya. Bagi para nelayan, belajar bersama dalam konteks komunitas bukan hanya meningkatkan keterampilan teknis, tetapi juga membentuk kesadaran baru akan peran mereka dalam menjaga ekosistem laut, membangun organisasi, dan menentukan arah hidupnya secara mandiri. *“Kalau dulu kita kerja sendiri-sendiri. Sekarang kita bisa kumpul, diskusi, cari solusi bareng. Kalau ada yang sakit, kita bantu.”* (Wawancara dengan Ketut M., nelayan Desa Sumberkima).

Makna ini sejalan dengan konsep **pemberdayaan sebagai pembelajaran sosial** (Buck et al., 2001), yang menumbuhkan solidaritas dan kemampuan reflektif. Dalam konteks nelayan, ini menjadi sumber daya kolektif yang dapat memperkuat kapasitas komunitas menghadapi tekanan eksternal (perubahan iklim, pasar, kebijakan).

c. **Pemberdayaan sebagai Transformasi Habitus dan Kesadaran Kritis**

Di tengah perubahan sosial yang dinamis, pemberdayaan menjadi wahana penting bagi transformasi pola pikir dan perilaku masyarakat nelayan. Melalui pengalaman berorganisasi, keterlibatan dalam pelatihan, serta interaksi dengan pendamping lapangan dan LSM, muncul perubahan bertahap dalam cara pandang terhadap diri sendiri, pekerjaan, alam, dan masa depan. Pemberdayaan dalam konteks ini tidak hanya mengubah aspek teknis kehidupan, tetapi juga **menata ulang habitus**, yaitu sistem nilai dan disposisi sosial yang membentuk laku hidup nelayan sehari-hari.

Sebelum proses pemberdayaan berjalan, banyak nelayan memaknai kemiskinan dan keterpinggiran mereka sebagai sesuatu yang "biasa" atau bahkan "takdir". Namun seiring waktu, partisipasi dalam forum-forum komunitas mulai mengubah persepsi tersebut menjadi kesadaran baru — bahwa ketertinggalan bukan semata kesalahan individu, melainkan hasil dari struktur sosial dan ekonomi yang timpang. Hal ini tercermin dari pernyataan salah satu informan berikut: *“Dulu saya pikir miskin itu nasib. Tapi sekarang saya tahu kalau kita bisa berubah asal kita mau usaha dan saling*

bantu. Kita juga bisa punya rencana, bukan cuma ikut ombak.” (Wawancara dengan Made N., nelayan muda, Desa Sumberkima)

Pernyataan tersebut menunjukkan terjadinya pergeseran dari **habitus pasrah** menuju **habitus aktif dan reflektif**, sebagaimana dijelaskan oleh Pierre Bourdieu. Dalam kerangka teorinya, habitus bukanlah sesuatu yang statis, tetapi dapat berubah melalui akumulasi **modal simbolik**, **modal sosial**, dan **modal budaya** — yang semuanya hadir dalam praktik pemberdayaan yang transformatif. Misalnya, pelatihan pengelolaan keuangan, diskusi tentang konservasi, serta pengalaman kolektif dalam mengelola kelompok menjadi alat perubahan struktur mental yang lebih memberdayakan.

Transformasi ini juga berkaitan erat dengan **kesadaran kritis** (*critical consciousness*), sebagaimana diungkapkan oleh Paulo Freire. Ketika nelayan mulai bertanya, “mengapa kami selalu di bawah?”, “mengapa hasil laut kami dikuasai orang lain?”, dan “apa yang bisa kami lakukan bersama?”, maka pemberdayaan telah melampaui fungsi administratif dan masuk ke ranah pembebasan sosial.

Dengan demikian, pemberdayaan bukan hanya memberikan alat, tetapi juga **mengubah cara nelayan memaknai dunia dan dirinya sendiri**. Inilah bentuk paling dalam dari makna pemberdayaan: proses memerdekakan kesadaran.

5. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat nelayan di wilayah pesisir barat Kabupaten Buleleng merupakan proses yang kompleks, multidimensional, dan sarat makna. Di satu sisi, pemberdayaan menghasilkan dampak positif yang signifikan, antara lain: penguatan kelembagaan lokal, peningkatan posisi tawar, strategi adaptasi terhadap tekanan musim dan pasar, serta tumbuhnya kesadaran ekologis yang lebih progresif. Di sisi lain, praktik pemberdayaan juga mengandung risiko disfungsi laten berupa overproduksi, degradasi lingkungan, ketergantungan terhadap bantuan, dan konflik sosial internal akibat ketimpangan akses terhadap program.

Lebih penting dari itu, pemberdayaan bagi masyarakat nelayan bukan sekadar program teknis atau alat distribusi sumber daya, melainkan suatu proses sosial yang mengandung makna ideologis, simbolik, dan kultural. Bagi banyak nelayan, pemberdayaan menjadi jalan untuk memperoleh harga diri dan pengakuan sosial, membentuk solidaritas baru melalui pembelajaran kolektif, serta mentransformasi habitus dari pasif menjadi reflektif dan mandiri. Proses ini menggeser pemberdayaan dari sekadar alat bantu menjadi wahana pembebasan dan penguatan kapasitas warga negara.

Secara teoretis, penelitian ini menegaskan bahwa pemberdayaan harus dipahami dalam kerangka yang melampaui teknokrasi pembangunan. Teori fungsionalisme (Merton) membantu melihat dampak manifes dan laten dari program, teori hegemoni (Gramsci) mengungkap dinamika kekuasaan dan resistensi, teori praktik sosial (Bourdieu) menjelaskan perubahan habitus dan akumulasi modal, sementara post-development (Korten, Escobar) mengkritik logika pembangunan yang hegemonik dan menawarkan model transformatif berbasis komunitas.

Dengan demikian, pemberdayaan yang efektif dan berkeadilan harus dirancang secara kontekstual, partisipatif, dan reflektif. Ia bukan sekadar intervensi dari luar, tetapi merupakan ruang dialog antara pengalaman lokal, nilai-nilai budaya, dan cita-cita transformasi sosial yang berkelanjutan. Hanya dengan memahami dan memaknai pemberdayaan secara utuh, masyarakat nelayan dapat bergerak dari keterpinggiran menuju kedaulatan sosial-ekologis.

DAFTAR PUSTAKA

- Adger, W. N. (2000). Social and ecological resilience: are they related? *Progress in Human Geography*, 24(3), 347–364.
- Bandura, A. (1977). *Social learning theory*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
- Bourdieu, P. (2010). *Arena Produksi Kultural: Sebuah Kajian Sosiologi Budaya*. (Terj. Yudi

- Santosa). Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Buck, L. E., Wollenberg, E., & Edmunds, D. (2005). *Pembelajaran sosial dalam pengelolaan hutan komunitas: Social learning in community forests* (A. E. Sileuw, Penerjemah). Bogor Barat: Pustaka LATIN dan CIFOR.
- Chambers, R. (2005). *Pembangunan yang Membebaskan: Rakyat sebagai Pelaku, Bukan Objek*. (Terj. M. Syaiful). Jakarta: LP3ES.
- Eko, S. (2004). *Pemberdayaan Masyarakat: Dari Konsep ke Implementasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Escobar, A. (2012). *Membongkar Mitos Pembangunan*. (Terj. E. Wahyuni). Yogyakarta: Insist Press.
- Gramsci, A. (2003). *Hegemoni, Demokrasi, dan Civil Society*. (Terj. A. Fauzan & A. Ma'arif). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Korten, D. C. (1993). *Pembangunan yang Memihak Rakyat: Pengalaman Perencanaan Pembangunan di Asia*. Jakarta: LP3ES.
- Korten, D. C. (1996). *Menuju Abad Ke-21: Peran LSM dalam Pembangunan*. Jakarta: Pustaka LP3ES.
- Kusnadi, M. (2003). *Nelayan dan Kemiskinan: Potret Kemiskinan Nelayan Tradisional di Indonesia*. Yogyakarta: LKiS.
- Kusnadi, M. (2007). *Pemberdayaan Masyarakat Pesisir: Perspektif Antropologi*. Yogyakarta: LKiS.
- Mayaguezz, H., Putri, Y. M., Tristiyanto, T., Putri, R. W., & Lahay, A. F. (2023). *Empowering Traditional Fisherfolk: Informing on Legal Rights in Marine Biodiversity. Probono and Community Service Journal*, 2(2).
- Merton, R. K. (2002). *Teori Sosiologi Tengah: Kritik dan Pengembangan*. (Terj. M. Solly Lubis). Jakarta: Rajawali Pers.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode Baru*. (Terj. Tjetjep Rohendi Rohidi). Jakarta: UI Press.
- Setiawan, H. D. (2022). Strategi Pemberdayaan Nelayan Kecil di Indonesia. *Ilmu dan Budaya*, 41(67), Artikel No. 808.